

WALI KOTA DUMAI
PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN WALI KOTA DUMAI
NOMOR 048/207/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM SATU DATA KOTA DUMAI
TAHUN 2022

WALI KOTA DUMAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan, berdasarkan data dan informasi yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggung jawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan, perlu dibentuk Forum Satu Data Kota Dumai sebagai wadah komunikasi dan koordinasi Instansi Pemerintah Daerah dan/atau Organisasi Instansi Vertikal untuk penyelenggaraan satu data daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Forum Satu Data Kota Dumai Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 251);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5502);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
13. Peraturan Presiden Nomor 127 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 Tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 255);
14. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28);
15. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
16. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1829);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

iml

len

21. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2009 Nomor 6 Seri D);
22. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Pemerintah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Pemerintah Kota Dumai Tahun 2020 Nomor 1 Seri D);
23. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2021 Nomor 4 Seri A);
24. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 32 Tahun 2016 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Nomor Tahun 2016 Nomor 27 Seri E);
25. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 59 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2018 Nomor 14 Seri D);
26. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2021 Nomor 8 Seri A);
27. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 68 Tahun 2021 tentang Satu Data Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2021 Nomor 54 Seri E).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN FORUM SATU DATA KOTA DUMAI TAHUN 2022.**
- KESATU** : Membentuk Forum Satu Data Kota Dumai Tahun 2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA** : Forum sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Pembina Data mempunyai tugas:
 1. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data; dan
 2. melakukan pembinaan penyelenggaraan satu data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Wali Data, mempunyai tugas:
 1. memeriksa kesesuaian data berdasarkan prinsip satu data;
 2. menyebarluaskan data dan meta data di portal satu data; dan
 3. Membantu pembina data dalam membina Produsen Data;
 - c. Wali Data Pendukung, mempunyai tugas:
 1. mengumpulkan data dari Produsen Data;
 2. memeriksa data berdasarkan prinsip satu data sebelum disampaikan kepada Wali Data;
 3. mengelola data dari produsen data berdasarkan prinsip satu data;
 4. melakukan verifikasi data sebelum data diunggah ke portal Data; dan
 5. melakukan revisi terhadap data yang dikembalikan;

- d. Produsen Data, mempunyai tugas:
1. memberikan masukan kepada pembina data mengenai standar data, meta data, dan interoperabilitas data;
 2. menghasilkan dan mengklasifikasikan data sesuai prinsip satu data;
 3. mengumpulkan, mengolah dan mengontrol kualitas data; dan
 4. menyampaikan data beserta metadata kepada Wali Data;
- f. Sekretariat Satu Data, mempunyai tugas:
- a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administrasi kepada forum satu data; dan
 - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data.

- KETIGA : Forum sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dan melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Wali Kota Dumai.
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Dumai Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini, mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 25 Februari 2022



WALI KOTA DUMAI,

PAISAL

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI KOTA DUMAI
 NOMOR 048/207 /2022
 TENTANG PEMBENTUKAN FORUM SATU DATA
 KOTA DUMAI TAHUN 2022

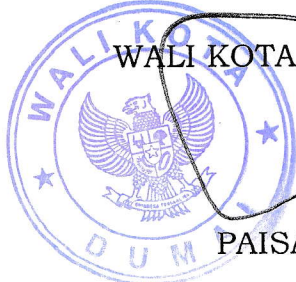
FORUM SATU DATA KOTA DUMAI
 TAHUN 2022

NO	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM FORUM
1	2	3
1.	WALI KOTA DUMAI	PENGARAH
2.	SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI	PENANGGUNG JAWAB
3.	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DUMAI	KOORDINATOR FORUM
I. PEMBINA DATA.		
4.	KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KOTA DUMAI	KETUA
5.	STATISTISI AHLI MUDA GOLONGAN III BADAN PUSAT STATISTIK KOTA DUMAI (ISWENDA NOVIANI, S.ST)	ANGGOTA
6.	STATISTISI AHLI MUDA GOLONGAN III BADAN PUSAT STATISTIK KOTA DUMAI (MEMI IRWAN, S.ST. M.SE)	ANGGOTA
7.	STATISTISI AHLI MUDA GOLONGAN III BADAN PUSAT STATISTIK KOTA DUMAI (RENI FARIDA, S.Si)	ANGGOTA
8.	STATISTISI AHLI MUDA GOLONGAN III BADAN PUSAT STATISTIK KOTA DUMAI (SISWINY MARITO OCTALYA BR. TAMBUNAN S.ST. SE. M.Si)	ANGGOTA
9.	PRANATA KOMPUTER AHLI MUDA GOLONGAN III BADAN PUSAT STATISTIK KOTA DUMAI (RINANDA HERSELINA BR. GINTING, S.ST)	ANGGOTA
II. WALI DATA.		
10.	KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA DUMAI	KETUA
11.	KEPALA BIDANG STATISTIK DAN PERSANDIAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA DUMAI	ANGGOTA
III. WALI DATA PENDUKUNG.		
12.	SEKRETARIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA DUMAI	KOORDINATOR
13.	SEKRETARIS INSPEKTORAT DAERAH KOTA DUMAI	ANGGOTA
14.	SEKRETARIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DUMAI	ANGGOTA
15.	SEKRETARIS BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA DUMAI	ANGGOTA
16.	SEKRETARIS BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA DUMAI	ANGGOTA
17.	SEKRETARIS BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA DUMAI	ANGGOTA
18.	SEKRETARIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	ANGGOTA
19.	SEKRETARIS DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN SERTA PERTANAHAN	ANGGOTA
20.	SEKRETARIS DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA DUMAI	ANGGOTA
21.	SEKRETARIS DINAS KESEHATAN KOTA DUMAI	ANGGOTA
22.	SEKRETARIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DUMAI	ANGGOTA

1	2	3
23.	SEKRETARIS DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA DUMAI	ANGGOTA
24.	SEKRETARIS DINAS TENAGA KERJA KOTA DUMAI	ANGGOTA
25.	SEKRETARIS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI	ANGGOTA
26.	SEKRETARIS DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA DUMAI	ANGGOTA
27.	SEKRETARIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA DUMAI	ANGGOTA
28.	SEKRETARIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA DUMAI	ANGGOTA
29.	SEKRETARIS DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA DUMAI	ANGGOTA
30.	SEKRETARIS DINAS PERHUBUNGAN KOTA DUMAI	ANGGOTA
31.	SEKRETARIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA DUMAI	ANGGOTA
32.	SEKRETARIS DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA DUMAI	ANGGOTA
33.	SEKRETARIS DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA DUMAI	ANGGOTA
34.	SEKRETARIS DINAS PERIKINAN KOTA DUMAI	ANGGOTA
35.	SEKRETARIS DINAS PERDAGANGAN KOTA DUMAI	ANGGOTA
36.	SEKRETARIS BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA DUMAI	ANGGOTA
37.	SEKRETARIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	ANGGOTA
38.	WAKIL DIREKTUR UMUM DAN KEUANGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA DUMAI	ANGGOTA
39.	KEPALA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI	ANGGOTA
40.	KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI	ANGGOTA
41.	KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI	ANGGOTA
42.	KEPALA BAGIAN KERJA SAMA SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI	ANGGOTA
43.	KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI	ANGGOTA
44.	KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI	ANGGOTA
45.	KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA; SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI	ANGGOTA
46.	KEPALA BAGIAN SUMBER DAYA ALAM SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI	ANGGOTA
47.	KEPALA BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI	ANGGOTA
48.	KEPALA BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI	ANGGOTA
49.	KEPALA BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI	ANGGOTA
50.	KEPALA BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI	ANGGOTA
51.	KEPALA BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI	ANGGOTA
52.	SEKRETARIS KECAMATAN DUMAI BARAT KOTA DUMAI	ANGGOTA
53.	SEKRETARIS KECAMATAN DUMAI TIMUR KOTA DUMAI	ANGGOTA

1	2	3
54.	SEKRETARIS KECAMATAN BUKIT KAPUR KOTA DUMAI	ANGGOTA
55.	SEKRETARIS KECAMATAN DUMAI KOTA KOTA DUMAI	ANGGOTA
56.	SEKRETARIS KECAMATAN DUMAI SELATAN KOTA DUMAI	ANGGOTA
57.	SEKRETARIS KECAMATAN MEDANG KAMPAI KOTA DUMAI	ANGGOTA
58.	SEKRETARIS KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN KOTA DUMAI	ANGGOTA
59.	KEPALA SEKSI PENDATAAN, PENGOLAHAN DAN ANALISIS DATA STATISTIK SEKTORAL DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA DUMAI	ANGGOTA
60.	KEPALA SEKSI PENYAJIAN DATA DAN INFORMASI STATISTIK SEKTORAL DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA DUMAI	ANGGOTA
61.	SEKRETARIS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA DUMAI	ANGGOTA
IV. PRODUSEN DATA.		
62.	KEPALA BIDANG STATISTIK DAN PERSANDIAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA DUMAI	KOORDINATOR
63.	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI	ANGGOTA
64.	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI	ANGGOTA
65.	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI	ANGGOTA
66.	INSPEKTUR DAERAH KOTA DUMAI	ANGGOTA
67.	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DUMAI	ANGGOTA
68.	KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA DUMAI	ANGGOTA
69.	KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA DUMAI	ANGGOTA
70.	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA DUMAI	ANGGOTA
71.	KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	ANGGOTA
72.	KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN KOTA DUMAI	ANGGOTA
73.	KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA DUMAI	ANGGOTA
74.	KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA DUMAI	ANGGOTA
75.	KEPALA SATUAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DUMAI	ANGGOTA
76.	KEPALA DINAS SOSIAL KOTA DUMAI	ANGGOTA
77.	KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA DUMAI	ANGGOTA
78.	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI	ANGGOTA
79.	KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA DUMAI	ANGGOTA
80.	KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA DUMAI	ANGGOTA
81.	KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTA DUMAI	ANGGOTA
82.	KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA DUMAI	ANGGOTA
83.	KEPALA DINAS DINAS PERHUBUNGAN KOTA DUMAI	ANGGOTA
84.	KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA DUMAI	ANGGOTA
85.	KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA DUMAI	ANGGOTA
86.	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA DUMAI	ANGGOTA
87.	KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA DUMAI	ANGGOTA
88.	KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA DUMAI	ANGGOTA
89.	KEPALA DINAS PERIKANAN KOTA DUMAI	ANGGOTA
90.	KEPALA DINAS PERDAGANGAN KOTA DUMAI	ANGGOTA
91.	KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	ANGGOTA

1	2	3
92.	SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI	ANGGOTA
93.	DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA DUMAI	ANGGOTA
94.	CAMAT DUMAI BARAT KOTA DUMAI	ANGGOTA
95.	CAMAT DUMAI TIMUR KOTA DUMAI	ANGGOTA
96.	CAMAT BUKIT KAPUR KOTA DUMAI	ANGGOTA
97.	CAMAT DUMAI KOTA KOTA DUMAI	ANGGOTA
98.	CAMAT DUMAI SELATAN KOTA DUMAI	ANGGOTA
99.	CAMAT MEDANG KAMPAI KOTA DUMAI	ANGGOTA
100.	CAMAT SUNGAI SEMBILAN KOTA DUMAI	ANGGOTA
101.	KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA DUMAI	ANGGOTA
102.	KEPALA SEKSI PENDATAAN, PENGOLAHAN DAN ANALISIS DATA STATISTIK SEKTORAL DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA DUMAI	ANGGOTA
103.	KEPALA SEKSI PENYAJIAN DATA DAN INFORMASI STATISTIK SEKTORAL DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA DUMAI	ANGGOTA
V. SEKRETARIAT SATU DATA.		
104.	SEKRETARIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DUMAI	KOORDINATOR
105.	KEPALA BIDANG PERENCANAAN, EVALUASI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DUMAI	ANGGOTA
106.	KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DUMAI	ANGGOTA
107.	KEPALA BIDANG PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DUMAI	ANGGOTA
108.	KEPALA BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DUMAI	ANGGOTA
109.	KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DUMAI	ANGGOTA
110.	PERENCANA AHLI MUDA GOLONGAN III BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DUMAI (LUSI ANDRIANI, S.Kom)	ANGGOTA



WALI KOTA DUMAI,
PAISAL